

LAPORAN HASIL SURVEI ORIENTASI BISNIS PERBANKAN OJK (SBPO)

—
TRIWULAN I - 2025

Dalam pelaksanaan *surveillance* perbankan, dibutuhkan informasi lebih mendalam, baik kuantitatif dan kualitatif, untuk melihat sinyal awal perubahan prospek/orientasi kegiatan bisnis bank. Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) dilaksanakan kepada Bank Umum pertama kali pada Triwulan III-2019 setiap triwulan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah/tendensi bisnis perbankan pada triwulan mendatang. SBPO menghasilkan suatu Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP), yaitu indeks komposit yang menunjukkan persepsi dengan rentang nilai 1 s.d. 100, di mana indeks >50 menunjukkan persepsi optimis, indeks =50 menunjukkan persepsi stabil, dan indeks <50 menunjukkan persepsi pesimis. IBP terdiri dari tiga subindeks yaitu Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR) dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK).

Selain IBP, SBPO juga menghasilkan proyeksi beberapa indikator baik makroekonomi maupun Perbankan. Berdasarkan perbandingan antara hasil survei dan realisasi secara historis terlihat bahwa SBPO cukup dapat memprediksi arah dari beberapa indikator baik makroekonomi maupun perbankan di Indonesia.



Hasil SBPO TW I - 2025 Menunjukkan Persepsi yang Optimis

Secara keseluruhan, hasil SBPO triwulan I-2025 menunjukkan persepsi yang optimis. Hal ini tecermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan I-2025 yang berada pada zona optimis di level 60, meskipun sedikit menurun dari level 66 pada triwulan IV-2024. Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi terhadap stabilitas kondisi makroekonomi, berlanjutnya peningkatan intermediasi, dan keyakinan bahwa bank cukup mampu mengelola risiko di tengah tantangan kondisi makroekonomi global..

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)

Triwulan I-2025

KETERANGAN	Q1'24	Q4'24	Q1'25
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	47	62	53
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	53	55	55
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	68	81	74
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	56	66	60

Sumber: SBPO TW I 2025, diolah

IBP TW I -
2025
60

Jumlah responden SBPO TW I - 2025



Porsi Aset responden dari total aset Bank Umum di Indonesia



Komponen Pembentuk IBP

A. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan I-2025 berada pada level optimis dengan indeks sebesar 53 meskipun menurun dari 62 pada triwulan IV-2024. Optimisme stabilitas makroekonomi pada triwulan I-2025 disebabkan oleh prediksi bahwa PDB yang masih akan stabil dan BI-Rate yang cenderung menurun. PDB diperkirakan masih akan cenderung tumbuh stabil dari realisasi triwulan IV-2024 sebesar 5,02% (yoy). Pertumbuhan PDB didorong oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan meningkat seiring dengan adanya Bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri pada triwulan I-2025, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, dan adanya stimulus ekonomi 2025 yang terutama diberikan pada bulan Januari dan Februari 2025. Stimulus ekonomi tersebut antara lain seperti pemberian bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan dan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA, diharapkan dapat menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan PDB pada triwulan I-2025, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Indonesia per Desember 2024

meningkat menjadi 51,2 yang juga menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia berada dalam zona ekspansif. Selain itu penurunan BI-Rate juga diperkirakan dapat mendorong pengusaha untuk melakukan ekspansi bisnis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, investasi dan pembangunan diperkirakan tetap akan berlanjut kuat khususnya penyelesaian proyek-proyek strategis nasional yang sempat tertunda pada akhir tahun 2024

Sedangkan suku bunga acuan BI-Rate diperkirakan menurun seiring dengan inflasi yang cukup rendah dan proyeksi akan pemangkasan suku bunga The Fed pada tahun 2025. Sejalan dengan proyeksi tersebut, pada Januari 2025 Bank Indonesia telah menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi sebesar 5,75%. Sedangkan pada *Federal Open Market Committee* (FOMC) meeting Januari 2025, The Fed mempertahankan suku bunga pada range 4,25%-4,50%.

Inflasi pada triwulan I-2025 diperkirakan meningkat yang utamanya didorong oleh proyeksi peningkatan permintaan barang

dan jasa utamanya pada pangan dan transportasi seiring dengan adanya Bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri serta adanya kenaikan upah minimum yang dapat meningkatkan biaya produksi sehingga menyebabkan inflasi. Inflasi pada Maret 2025 diperkirakan naik lebih tinggi dari realisasi inflasi Desember 2024 sebesar 1,57%.

Selanjutnya, nilai tukar Rupiah terhadap USD diperkirakan cenderung melemah dari Rp16.162/USD (kurs tengah 31 Desember 2024). Per 31 Januari 2025, kurs tengah nilai tukar Rupiah terhadap USD per 31 Januari 2025 melemah hingga sebesar Rp16.259/USD.

IKM

diwakili ekspektasi responden terhadap PDB, BI-Rate, laju Inflasi, dan kurs IDR/USD

B. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan I-2025 masih terjaga dan terkendali. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 55 yang berada di zona optimis stabil dari triwulan sebelumnya. Seiring dengan penyaluran kredit yang diperkirakan meningkat, bank tetap melakukan monitoring dan penagihan nasabah kredit bermasalah serta pelaksanaan hapus buku untuk menekan peningkatan NPL. Responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF gross) pada triwulan I-2025 akan membaik dari 2,08% pada posisi Desember 2024. Namun demikian, masih terdapat potensi peningkatan NPL yang berasal dari pemburukan kredit restrukturisasi Kol 1 dan Kol 2, seiring dengan menurunnya kondisi usaha debitur dikarenakan perekonomian yang belum stabil.

Selanjutnya, risiko pasar diperkirakan cukup terjaga antara lain karena perbankan menjaga PDN pada level rendah dan berada pada posisi long serta NIM yang diproyeksikan meningkat. Berdasarkan data aktual, rasio PDN per Desember 2024 sebesar 1,34% atau masih pada level rendah, jauh di bawah *threshold* 20%. Selanjutnya, NIM diperkirakan meningkat seiring proyeksi peningkatan penyaluran kredit. Berdasarkan hasil survei, NIM diproyeksi akan lebih tinggi dibandingkan realisasi NIM per Desember 2024 sebesar 4,72%.

Risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga dan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong ekspektasi "alat likuid (kas dan setara kas)" perbankan yang masih akan tumbuh. Sejalan dengan hal tersebut, hingga Desember 2024 rasio AL/NCD masih jauh di atas *threshold* 50% yaitu sebesar 112,87%

IPR

diwakili persepsi/ekspektasi responden terhadap NPL/NPF, NIM, PDN, dan *net cash-flow*

C. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan I-2025 masih optimis dengan IEK sebesar 74, meskipun menurun dari 81 pada triwulan IV-2024. Optimisme kinerja perbankan didorong oleh ekspektasi peningkatan DPK dan penyaluran kredit yang berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan.

Optimisme kenaikan pertumbuhan kredit didorong oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik yang terus berlanjut dan adanya momentum bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri yang dapat mendorong permintaan kredit dan aktivitas usaha masyarakat. Selain itu, faktor penurunan BI-Rate pada Januari 2025 sebesar 25 bps dapat membuat biaya kredit lebih rendah sehingga dapat menarik debitur. Selanjutnya, responden memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit hapus buku diperkirakan cenderung menurun.

Undisbursed Loan diperkirakan menurun sejalan dengan proyeksi kenaikan kredit

sebagai dampak meningkatnya aktivitas bisnis debitur. Sedangkan untuk kredit restrukturisasi diperkirakan menurun seiring dengan membaiknya kinerja debitur.

Dari sisi pertumbuhan kredit, kredit/pembiayaan diperkirakan masih akan tumbuh pada Maret 2025.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan I-2025, DPK juga akan tumbuh sejalan dengan kegiatan ekonomi yang semakin membaik, usaha bank dalam memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit dan adanya dana pemerintah yang akan masuk pada bank daerah pada Triwulan I. Kenaikan DPK diperkirakan akan lebih didorong terutama oleh deposito. Lebih lanjut, suku bunga DPK diperkirakan cenderung menurun dibandingkan triwulan IV-2024 seiring dengan BI-Rate yang telah mengalami penurunan pada Januari 2025.

IEK

diwakili persepsi/ekspektasi responden terhadap pertumbuhan kredit, DPK, laba, dan permodalan bank

ANECDOTAL INFORMATION

Berdasarkan hasil survei pada triwulan I-2025, diperoleh informasi terkait beberapa isu sebagai berikut:

a. Outlook Ekonomi Global dan Indonesia Tahun 2025

Berdasarkan hasil SBPO diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat. Hal ini didorong oleh ketidakpastian kondisi global seiring dengan masih cukup tingginya tensi geopolitik antara Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina meskipun telah terjadi gencatan senjata oleh Israel di Gaza, adanya kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump yang dapat memicu *trade war* dan mendorong ekonomi Amerika Serikat (AS) semakin kuat sehingga berdampak pada proyeksi penurunan *Federal Funds Rate* (FFR) yang relatif terbatas di tahun 2025.

Sedangkan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan oleh responden tumbuh cukup stabil. Proyeksi tersebut didorong oleh penurunan suku bunga acuan, kebijakan ekonomi pemerintah yang *pro growth*, berakhirnya aksi *wait and see* oleh para investor untuk investasi kembali pasca tahun politik di 2024, serta inflasi yang diperkirakan masih terkendali. Pertumbuhan ekonomi domestik juga masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan manufaktur yang diproyeksikan terus bertumbuh. Namun demikian, perlu diwaspadai dampak yang mungkin muncul terhadap Indonesia dengan adanya *trade war*, karena dapat berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi China dan dapat memengaruhi ekonomi dunia termasuk Indonesia. Hal ini mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Indonesia dengan pangsa ekspor sebesar 26,40%. Lebih lanjut, kekhawatiran terhadap fenomena menurunnya daya beli masyarakat masih cukup membayangi perekonomian Indonesia.

b. Faktor-Faktor dan Kondisi Global dan Domestik yang dapat Memengaruhi Perbankan pada Tahun 2025

Terdapat beberapa faktor pada kondisi global dan domestik yang dapat memengaruhi perbankan pada tahun 2025. Beberapa faktor dari kondisi global antara lain:

- 1) Ketidakpastian akan naik atau turunnya suku bunga AS, mengingat besarnya FFR berpengaruh pada BI-Rate dan penentuan suku bunga DPK dan Kredit oleh perbankan.
- 2) Perubahan suku bunga US, yang juga dapat memengaruhi kondisi dalam negeri khususnya perubahan behavior dari investor asing.
- 3) Konflik geopolitik yang masih cukup rentan dapat memengaruhi kestabilan ekonomi global dan nilai tukar.

Sedangkan faktor pada domestik yang dapat memengaruhi perbankan pada tahun 2025 antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi Nasional, karena pertumbuhan ekonomi nasional yang moderat dapat memengaruhi permintaan kredit dan likuiditas perbankan.
- 2) Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral Indonesia akan berpengaruh besar pada sektor perbankan, termasuk pengaturan suku bunga dan kebijakan kredit.
- 3) Stabilitas Sistem Keuangan, di mana stabilitas sistem keuangan domestik dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
- 4) Digitalisasi dan Teknologi Finansial: Adopsi teknologi digital, perbankan digital, dan *e-commerce* yang semakin luas menuntut bank untuk berinovasi dalam layanan dan operasional. Bank juga harus menangani risiko *cyber* yang meningkat.

c. Tantangan dan Risiko yang Perlu Diwaspadai oleh Perbankan Pada Tahun 2025

Berdasarkan hasil survei, diperoleh bahwa terdapat beberapa tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai oleh perbankan pada tahun 2025 antara lain:

- 1) Pengetatan likuiditas
- 2) Penurunan kualitas kredit
- 3) Isu keamanan digitalisasi - *Cyber Risk*

Dalam menghadapi tantangan dan risiko yang mungkin muncul tersebut, bank telah memiliki beberapa langkah mitigasi seperti:

- 1) Selektif dalam melakukan ekspansi kredit untuk menjaga kualitas kredit;
- 2) Melakukan manajemen likuiditas yang optimal, cermat dalam portofolio *mix* dan kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan yang murah dan juga stabil;
- 3) Diversifikasi portofolio dengan memperluas layanan dan produk ke berbagai sektor untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang di berbagai pasar;
- 4) Melanjutkan manajemen risiko yang baik dengan terus mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko yang mungkin timbul, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia;
- 5) Memperkuat *security level* untuk memitigasi *cyber risk*.

d. Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah menjadi 12%

Pemerintah telah meningkatkan PPN atas Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah menjadi 12% melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menurut sebagian responden, adanya kenaikan PPN tersebut tidak akan berdampak signifikan bagi penyaluran kredit perbankan mengingat debitur yang mungkin terdampak atas aturan PPN 12% tersebut memiliki *cash flow* yang cukup baik. Meskipun tidak berdampak signifikan, namun demikian tentunya peningkatan PPN tersebut akan berdampak pada beberapa sektor ekonomi seperti sektor otomotif terutama untuk mobil *Low Cost Green Car* (LCGC), properti mewah, pariwisata dan perhotelan mewah. Adapun mitigasi yang dilakukan oleh bank dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul atas kenaikan PPN terhadap sektor-sektor tersebut yaitu dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, selain itu juga dengan melakukan diversifikasi portofolio kredit ke sektor yang lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan PPN.

Selanjutnya, terhadap pengimpunan dana pihak ketiga bank diperkirakan kebijakan peningkatan PPN akan berdampak pada DPK meskipun tidak signifikan. Adapun dampak yang muncul karena alokasi untuk konsumsi masyarakat akan menjadi lebih besar dan alokasi dana yang biasa disimpan untuk tabungan akan berkurang. Selain itu, daya beli masyarakat juga

dapat berkurang sehingga masyarakat akan cenderung menempatkan dananya pada produk investasi lain yang lebih menguntungkan seperti emas atau obligasi. Bank akan melakukan beberapa langkah untuk memitigasi dampak dan risiko yang mungkin muncul tersebut seperti menawarkan produk atau layanan yang lebih menarik bagi nasabah.

e. Prospek, Tantangan dan Peluang terkait Pembiayaan Hijau Pada Tahun 2025

Pada Tahun 2025 terdapat beberapa peluang untuk meningkatkan dan mengembangkan pembiayaan hijau seperti:

- 1) Terdapat proyek-proyek hijau akan tumbuh seiring dengan meningkatnya *awareness* dari pemangku kepentingan
- 2) Diterbitkannya kebijakan Pemerintah untuk mulai mengimplementasikan program ekonomi hijau seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mencapai *net zero emission* pada Tahun 2060 atau lebih cepat.
- 3) Minat masyarakat terhadap investasi dan pembiayaan berkelanjutan juga baik sehingga dapat mendorong sektor perbankan untuk menyediakan produk yang mendukung keberlanjutan.

Hal ini membuka peluang bagi perbankan untuk memperbesar pembiayaan hijau dan berkolaborasi dengan bank serta lembaga pemerintah dalam mendanai proyek ramah lingkungan. Namun demikian, dalam mewujudkan target dan peluang pembiayaan hijau, terdapat beberapa tantangan seperti:

- 1) Diperlukan regulasi yang jelas terkait standarisasi pengukuran dalam klasifikasi proyek-proyek hijau;
- 2) Diperlukan regulasi maupun insentif yang berfokus pada industri tertentu perlu mendapatkan perhatian agar mendorong pelaku industri, investor maupun masyarakat lebih tertarik bergerak menuju pembiayaan hijau;
- 3) Infrastruktur yang belum memadai;
- 4) Teknologi hijau yang mahal dan tergolong belum matang;
- 5) *Greenwashing*, dimana proyek atau produk mengklaim sudah ramah lingkungan padahal tidak atau belum memenuhi kriteria hijau yang seharusnya.

f. Prospek Sektor Manufaktur dan Properti Pada Tahun 2025

Sektor industri manufaktur di tahun 2025 diproyeksikan tetap tumbuh yang didorong salah satunya fokus pemerintah untuk memprioritaskan sektor industri manufaktur, khususnya yang berorientasi ekspor dan padat karya. Hal ini tecermin pada beberapa stimulus ekonomi 2025 yang ditujukan untuk sektor padat karya seperti pemberian insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, diskon 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta pemberian fasilitas berupa pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, sektor properti diperkirakan juga masih akan tumbuh meskipun terbatas yang salah satunya didorong oleh faktor daya beli masyarakat yang juga masih terbatas. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan sektor properti seperti penurunan BI-Rate sehingga suku bunga KPR dapat lebih turun, penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah seperti pembangunan jalan tol, jalur MRT dan LRT dapat meningkatkan daya tarik properti dan program pemerintah seperti subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

g. Potensi Dampak yang Akan Muncul dari Kebijakan Upah Minimum (UMP/UMK) 2025 terhadap Perbankan

Pemerintah telah menaikkan Upah Minimum 2025 sebesar 6,5% dari Upah Minimum tahun 2024. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi perbankan karena dengan peningkatan UMP tersebut maka dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang juga dapat mendorong permintaan kredit konsumsi. Selain itu, peningkatan UMP juga dapat meningkatkan DPK perbankan.

Namun demikian, kenaikan UMP 2025 juga memberikan dampak negatif di antaranya meningkatnya beban operasional terutama untuk industri yang sifatnya *labor-intensive*. Dengan kenaikan beban operasional tersebut, dapat berdampak pada kemampuan industri dalam membayar pinjaman kepada bank dan dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah (*non-performing loans/NPL*). Secara langsung, kebijakan kenaikan UMP/UMK juga akan memengaruhi gaji karyawan pada masing-masing bank. Hal ini dapat meningkatkan beban operasional bank. Dengan biaya operasional yang meningkat, rasio efisiensi bank (BOPO) dapat memburuk, yang pada akhirnya dapat menekan profitabilitas. Selanjutnya, kenaikan

UMP juga dapat berpotensi menyebabkan inflasi, yang dapat berdampak pada penyesuaian suku bunga. Jika inflasi meningkat signifikan, dimungkinkan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk mengendalikannya dan hal ini dapat meningkatkan biaya dana bagi bank

